



**PENANGANAN KEAMANAN MARITIM PERBATASAN WILAYAH LAUT DAN
DAMPAKNYA PADA ASPEK PERTAHANAN KEAMANAN
(Studi di Wilayah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau)**

***Handling of Maritime Safety Border of Marine Area and Its Implications
fSecurity Defense Aspect
(Study in Natuna District, Riau Islands Province)***

ANTHONI SUGIANTO¹, DAFRI AGUSSALIM², ARMAIDY ARMAWI³

¹Mahasiswa Program Studi Ketahanan Nasional UGM, as200455@gmail.com, 081289428283

² Dosen Hubungan Internasional Fisipol, Universitas Gadjahmada, email: dafri@ugm.ac.id, 081227342500

³ Dosen Ilmu Filsafat, Universitas Gadjahmada, email: armaidy@ugm.ac.id, 08122955470

ABSTRAK: Stabilitas keamanan maritim terganggu oleh berbagai bentuk ancaman yakni: *illegal fishing, transshipment, drug smuggling, human trafficking, piracy and terrorism*. Kajian ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan keamanan maritim dan sejauh mana dampak pelaksanaan keamanan maritim tersebut. Metode penelitian dengan kualitatif, pengambilan data primer dilakukan observasi langsung, *in depth interview*, sumber literatur sebagai data sekunder. Gangguan keamanan maritim pada batas wilayah yakni pencurian ikan oleh nelayan asing sampai perairan kedaulatan, pengusiran nelayan indonesia oleh kapal negara asing seperti China dan Vietnam, serta terdapat konfrontasi antara aparat keamanan laut dengan aparat penjaga laut negara asing. Tingkatkan sinergitas para aparat pertahanan-keamanan agar lebih erat dalam menjaga wilayah batas laut terutama laut Natuna Utara. Tugas penting pemerintah pusat melalui kementerian luar negeri tetap mengawal penyelesaian sengketa batas wilayah.

Kata kunci: Keamanan Maritim, Perbatasan Wilayah Laut, Pertahanan Keamanan

ABSTRACT: *Maritime security stability is disrupted by various forms of threats, namely: illegal fishing, transshipment, drug smuggling, human trafficking, piracy and terrorism. This study discusses how the implementation of maritime security and the extent of the impact of the implementation of maritime security. The research method is qualitative, primary data collection is done by direct observation, in-depth interviews, literature sources as secondary data. Maritime security disturbances at the territorial boundaries are theft of fish by foreign fishermen to territorial waters, expulsion of Indonesian fishermen by ships from foreign countries such as China and Vietnam, and there is a confrontation between maritime security apparatus and foreign maritime guards. Increase the synergy of the defense-security apparatus so that they are more closely guarded in the maritime boundaries, especially the North Natuna Sea The important task of the central government through the ministry of foreign affairs is to continue to oversee the settlement of territorial border disputes.*

Keywords: *Maritime Security, Sea Borders, Security Defence*



PENDAHULUAN

Peningkatan keamanan dan kedaulatan wilayah teritorial suatu negara berdasarkan batas laut yang mengelilingi wilayah daratannya. Hal tersebut menjelaskan mengapa keamanan maritim merupakan isu penting suatu negara. Berbagai bentuk ancaman di laut yang mengganggu stabilitas keamanan maritim sangat bervariasi yakni: *illegal fishing, transshipment, drug smuggling, human trafficking, piracy and terrorism*. Kasus yang terjadi beberapa tahun terakhir diantaranya kasus *illegal fishing* oleh kapal tangkap ikan asing yang masih sering terjadi, menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti...“negara kita sudah banyak dirugikan oleh praktik *Illegal, Unregulated, Unreported (IUU) Fishing*”...nilai kerugiannya diperkirakan mencapai 300 triliun per tahun...”(KKP, 2015). Kapal-kapal nelayan RRT ditangkap pihak Indonesia di wilayah ini, dan pihak Indonesia membakar dan meledakkan kapal-kapal nelayan RRT dan juga negara lainnya untuk dijadikan rumpon agar ikan-ikan tetap berkumpul diwilayah itu. Bahkan berikutnya, kapal-kapal nelayan RRT mulai dikawal oleh kapal penjaga pantai (*Coast Guard*) milik RRT (Ramli, 2017).

Kejahatan di wilayah perbatasan laut kebanyakan pelakunya nelayan asing yang masuk dengan pengawalan dan pengawasan dari *Coast Guard* negara-nya di perairan perbatasan laut Indonesia. Berkenaan dengan kejadian tersebut Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti berusaha keras menurunkan angka *illegal fishing*, meski mengetahui anggotanya gagal dalam melakukan penangkapan terhadap kapal pelaku *illegal fishing* KM Kway Fey 100078. Bahkan Susi meminta Kementerian Luar Negeri Indonesia mengajukan protes diplomatik (Adiastuti, 2018).

Kejadian nekatnya nelayan asing sering masuk karena adanya pengawalan di laut oleh aparat hukum negaranya, hal ini termasuk dalam permasalahan politik luar negeri dan pertahanan-keamanan, di mana negara yang wilayahnya terdapat ancaman di wilayah lautnya kedaulatannya, secara langsung efek dari ancaman laut berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Aspek Keamanan ini menjadi perhatian negara dalam konteks keamanan maritim. Kondisi wilayah Indonesia memiliki kondisi geografis dan



geopolitik yang sangat penting. Terkait isu geografis yakni isu perbatasan antar negara di kawasan Asia Pasifik masih memiliki potensi sengketa perbatasan yang belum sepenuhnya dapat diselesaikan. Fakta empiris menunjukkan salah satu penyebab utama terjadinya kejahatan tradisional dan non tradisional terkait soal batas wilayah. Keamanan serta krisis yang sedang berlangsung dalam konteks ini dapat meningkatkan terjadinya ancaman tradisional apabila manajemen sengketa tidak dapat dilakukan secara tepat.

Tujuan dari penelitian ini mengkaji penanganan keamanan maritim yang telah terlaksana serta mengkaji dampak dari penanganan keamanan maritim terhadap aspek pertahanan keamanan pada wilayah Natuna. Teori ini akan membantu dalam menghubungkan masalah penanganan keamanan dengan kekuatan maritim, hubungan dari para pemangku kepentingan dalam keamanan maritim terhadap negara yang berwawasan maritim. Dalam buku *Maritime Security in The Indo-Pasific* (Agistia & Perwita, 2016) konsep teori AT Mahan mengungkapkan tentang kondisi wilayah suatu negara yang sangat berpotensi terhadap kekuatan maritimnya, eksploitasi terhadap negara kontinentalnya.

Bagaimanapun kondisi geografis berbicara tentang faktor populasi yang sangat mendukung baik tenaga kerjanya maupun kekuatan militernya yang potensial. Keterkaitan populasi dikatakan Mahan sangat mendukung pandangan kemaritimannya, meski hal tersebut butuh campur tangan dari pemerintah sebagai kontrol terhadap *sea power* dalam mencapai aspek politik, ekonomi dan pertahanan keamanannya. Permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut yakni bagaimana penanganan keamanan maritim yang telah dilaksanakan? dan bagaimana dampaknya terhadap ketahanan wilayah kabupaten Natuna?

METODE

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data primer berupa observasi ke lapangan dan wawancara secara mendalam (*in depth interview*) kepada pemangku kepentingan penanganan keamanan maritim di Natuna khususnya yang memiliki armada kapal patroli serta yurisdiksinya sampai perbatasan wilayah laut, pemda, masyarakat kelompok nelayan dan pengusaha perikanan yang digerakkan pemerintah. Data sekunder diperoleh dengan foto lokasi, wawancara dengan pejabat Instansi baik TNI AL, BAKAMLA RI, KKP, Kemlu

khususnya yang menangani hub kerjasama Indonesia-Vietnam dan informasi petunjuk dari masyarakat nelayan setempat maupun studi literatur yang berkaitan dengan data kejadian pencurian ikan oleh asing dan masyarakat nelayan lokal serta domestik kurun 5 tahun terakhir dijadikan sebagai data sekunder. Data ditelaah dan disaring serta dijadikan bahan kajian agar hasil lebih akurat dan nyata sesuai di lapangan.

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini dengan analisis model interaktif (*interactive model of analysis*) yang terdiri dari tiga komponen analisis berupa Milles dan Huberman dalam Sugiyono (2013, pp 15-16) mengatakan:

- a. Reduksi data (*reduction data*), yakni data yang diperoleh di lokasi penelitian/data lapangan yang dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan lapangan akan dirangkum, dipilih hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya.
- b. Sajian data (*data display*), yakni memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian.

- c. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing*), yakni melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data.

Teknik penyajian data dalam bentuk teks naratif untuk menjelaskan kondisi yang riil Kabupaten Natuna. Disamping itu proses penanganan keamanan yang telah berjalan dikumpulkan dari para responden yang sudah di pilih oleh peneliti, berusaha mencari data konkrit tentang hasil dari pelaksanaan pengamanan serta melihat dukungan pemda dan pemerintah pusat riil yang telah berjalan di lapangan. Melihat kondisi riil bisa dilihat apakah program yang selama ini berjalan di Kabupaten Natuna atau masih dalam proses.

Tahap implementasi serta dampak yang ditimbulkan oleh bidang pertahanan-keamanan dan evaluasi program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah pusat dan pelaksanaan keamanan di Kabupaten Natuna dengan kondisi wilayahnya berbatasan dengan negara tetangga, serta mengobservasi dampaknya. Data yang telah disajikan tersebut kemudian diolah berdasarkan teori-teori yang telah dikemukakan sebelumnya untuk

memperoleh gambaran secara jelas. Keseluruhan data yang telah dikumpulkan menjadi satu oleh peneliti selanjutnya diolah dan disajikan agar bisa masuk tahap kesimpulan (Sugiyono, 2013: 45).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara astronomis, Kabupaten Natuna

terletak pada titik koordinat 01°18'00" - 06°50'15" LU (Lintang Utara) dan 104°48'30" - 110°02'00" BT (Bujur Timur). Sedangkan titik koordinat Kantor Bupati Natuna terletak pada titik koordinat 3°56'28.62" LU (Lintang Utara) dan 108°22'38.53" BT (Bujur Timur). Kondisi umum lokasi Kabupaten Natuna seperti pada Gambar 1.



(Sumber: BPPD Natuna, 2018)

Gambar 1. Kondisi Umum Lokasi Kabupaten

Batas wilayah Kabupaten Natuna:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan

Vietnam di perairan Laut Natuna Utara.



- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kepulauan Anambas dan Semenanjung Malaysia/ Malaysia Barat.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tambelan dan Kabupaten Bintan.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Malaysia Timur di perairan Laut Natuna Utara dan Provinsi Kalimantan Barat.

Luas wilayah Kabupaten Natuna 224.684,59 km² dengan luas daratan sebesar 2.000,85 km² dan luas lautan sebesar 222.683,74 km². Kabupaten Natuna terdiri dari pulau-pulau, terdapat 154 pulau di kabupaten ini, dengan 27 pulau (17,53 persen) yang berpenghuni dan 127 pulau (82,44 persen) tidak berpenghuni. Dari semua kecamatan, Kecamatan Serasan memiliki jumlah pulau terbanyak yang belum berpenghuni yaitu 30 pulau (23,62 persen dari total pulau belum berpenghuni. Dua pulau terbesar di antaranya Pulau Bunguran, dan Pulau Serasan. Persentase luas laut 99,75% dan luas daratannya 0,25%. Maka kondisi secara geografis Natuna merupakan wilayah pulau terdepan yang harus mendapatkan penanganan keamanan maritim (BPS Kabupaten Natuna, 2018).

Kondisi wilayah laut yang sangat luas butuh “Kebijakan pemerintah dalam situasi keamanan di Laut China Selatan” oleh (Prabowo, 2013). Estu Prabowo mengatakan bahwa keamanan Laut China Selatan belum mendapat perhatian penting dari pemerintah Indonesia, penyebabnya posisi Indonesia termasuk *Non Claimant State*. Keamanan ini masih diselesaikan dengan *soft power*, dengan pemikiran tentang klaim wilayah oleh China (termasuk Taiwan) berdasarkan sejarahnya, sedangkan negara *claimant state* menetapkan klaimnya berdasarkan batas wilayahnya sesuai hasil *Convention* dan *UNCLOS 1982*. China dalam kasus ini mengupayakan wilayah yang dipertentangkan menjadi wilayah strategis bagi nelayan tradisional, serta pemenuhan sumber daya energinya.

Meski Indonesia bukan negara klaim akan tetapi negara-negara tetangga masih berusaha masuk dan kekhawatiran dari pemerintah setempat yakni terkait pencurian terhadap sumber daya alam dari Natuna utara yang dimiliki di Blok D Alpha Natuna, di mana sumber daya cadangan gas bumi yang belum matang merupakan sumber daya masa depan (Sugito, 2008) berkaitan dengan penguasaan Blok D- Alpha, termasuk daerah strategis yang bisa



memenuhi kebutuhan energi minyak dan gas Indonesia. Pertarungan perebutan energi terkait ketahanan energi suatu negara, permasalahan perebutan wilayah pemicu awal dari para *claimant state* dalam mempertahankan kedaulatan wilayah beserta sumber daya alamnya. Peranan pemerintah dalam mempertahankan wilayahnya masih menggunakan *soft power* dan *hard power* sebagai upaya mempertahankan sumber daya energi yang terkandung. Peranan pemerintah sangat penting sebab kegagalan diplomasi penyelesaian sengketa wilayah akan kehilangan pengelolaan sumber energi di Blok D Alpha.

Penanganan keamanan maritim meliputi dua hal yakni penanganan ancaman dari dalam dan ancaman yang datang dari luar. Penanganan ancaman nyata dari luar yakni pencurian ikan oleh nelayan asing khususnya Vietnam, hal ini merupakan ancaman terhadap kekayaan hayati Natuna. Sumber daya alam hayati ini secara tidak langsung sudah mulai berkurang sebab persaingan daya tangkap dari nelayan Vietnam dengan nelayan lokal yang memakai alat tangkap tradisional, nelayan lokal beranggapan bahwa bahwa ikan di laut Natuna tidak akan habis bila di ambil dengan

cara tradisional dan tidak merusak habitat alam bawah laut. Tetapi kenyataan berubah ketika nelayan Vietnam yang sebelum tahun 2014 bisa masuk sampai ke perairan teritorial dan bisa barter umpan dan ikan akan tetapi keadaan memanas setelah aparat keamanan maritim Indonesia mulai melarang nelayan Vietnam masuk, terjadi tragedi yakni pengusiran kapal nelayan lokal yang mulai sukar menjaring ikan dengan lokasi 5 mil, akan tetapi lama kelamaan mulai menjauh sampai ke perbatasan wilayah laut Indonesia.

Pencurian Kekayaan Laut Hayati Dan Non Hayati Natuna

Permasalahan sulitnya ikan di perairan teritorialnya memicu nelayan Vietnam masuk ke wilayah Landasan Kontinen Indonesia. Potensi ikan tangkap di Indonesia sangat melimpah, karena *sea bed* dan terumbu karang Indonesia masih sangat terjaga dan suhunya hangat, hal tersebut membuat ikan banyak bertelur di wilayah bawah laut Indonesia. Kondisi Indonesia ini menjadi tidak aman dari pencurian ikan oleh negara tetangga yakni nelayan Vietnam.

Tabel 1
Kapal Yang Tertangkap di Perbatasan Indonesia

NO	Negara	Jumlah Kapal
1	Vietnam	280



2	Filiphina	100
3	Thailand	60
4	Malaysia	40
5	Indonesia	30
6	China	1
Jumlah		511

(Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan di olah Peneliti, 2019)

Tabel 1 menjelaskan bahwa kejadian penenggelaman kapal ikan di Indonesia dominasi pelakunya paling banyak dilakukan oleh nelayan Vietnam, hal tersebut dikarenakan peningkatan kebutuhan ekonomi negara tersebut yang terbesar yakni dari sektor perikanan.

Strategi Keamanan Maritim Indonesia Dalam Menanggulangi Ancaman Non Tradisional Security, studi kasus Illegal Fishing periode tahun 2005-2010 yang diteliti oleh Ikhtiar dalam tesisnya yang berjudul Menurut Ikhtiar masalah keamanan laut perlu adanya pengawasan yang dilakukan oleh TNI AL berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Praktik Illegal Fishing dianggap banyak merugikan negara. Dalam studi kasus ini jelas ada perbedaan yang terletak pada kompleksitas penanganan keamanan yang bukan hanya pada masalah kasus eksplorasi ikan secara illegal. Hasil penelitian

Ikhtiar lebih mengutamakan *sinergitas* TNI AL bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan, pada periode di atas tahun 2010 lebih banyak membutuhkan kerja sama dengan *stakeholder* keamanan laut untuk memagari laut perbatasan khususnya yang berbatasan langsung dengan negara tetangga (Ikhtiar, 2011).

Kejadian semakin lama semakin berlanjut karena kebutuhan hidup dan ekonomi dari masyarakat Vietnam, jumlah kapal Vietnam menduduki peringkat atas mencapai 280 buah kapal yang masuk dan menerobos wilayah yang masuk dalam sengketa di dan sudah dinyatakan bersalah serta ditenggelamkan di Indonesia. Nelayan Vietnam mengandalkan laut di perbatasan laut Natuna karena di wilayah lautnya hampir tidak ada ikan, jadi mereka nekat memasuki wilayah negara tetangganya. Selain itu, perekonomian Vietnam mengandalkan sektor perikanan dan ladang terdekat yakni perbatasan Natuna.

Pengusiran Kapal Ikan Nelayan Lokal Oleh Kapal Pengawas Perikanan Vietnam

Pengalaman buruk nelayan lokal/tradisional tidak bisa dihilangkan, sebab mereka bingung dengan daerah penangkapannya sendiri di ZEE. Seharusnya,

yang mencuri takut dan ini kejadian yang terbalik, tuan rumah harus keluar dari pekarangannya sendiri. Terasa tidak adil kejadian pengusiran yang jelas pemilik wilayah laut harus mengalah dengan pendatang dari negara tetangga. Bila kapal Indonesia dalam jumlah lebih dari 10 kapal menangkap ikan di perbatasan kemungkinan yang terjadi kapal ikan Vietnam tidak berani untuk mengusirnya. Pendapat (Buzan, 1991) tentang keamanan wilayah tentang ketiadaan ancaman di wilayah sendiri terutama wilayah suatu negara sudah ada batas-batasnya.

Kejadian terkait masuknya kapal nelayan Vietnam berani mengusir karena jumlah mereka lebih banyak dan berkelompok serta didampingi kapal pengawas perikanan dari negaranya, seperti pada Gambar 2 (Nelayan Penagi, 2019). Kejadian pengusiran merupakan ancaman keamanan wilayah yang berdampak terhadap kedaulatan wilayah sendiri, di mana pengamanan wilayah kemaritiman harus ditingkatkan. Apapun alasannya, motif nelayan Vietnam yang masuk ke perbatasan merupakan tindakan *Illegal Enterance*. Pengusiran yang mereka lakukan merupakan bentuk *defensif* dari pengakuan wilayah ZEE Indonesia yang mereka klaim sebagai wilayah

pemancingan mereka. Dampaknya termasuk gangguan terhadap sektor ekonomi dan keamanan lingkungan, dikatakan bahwa pengelolaan wilayah tersebut merupakan kesejahteraan serta dukungan sektor ekonomi bagi nelayan setempat dan *human security* bagi rakyat negara tersebut.



Gambar 2 Foto Kapal Pengawas Perikanan Vietnam di Perbatasan Laut Natuna

Gambar 2 berupa foto yang diambil oleh nelayan Penagi saat melakukan penangkapan ikan bertemu dengan kapal pengawas perikanan milik negara Vietnam yang sedang melakukan pengawalan di perbatasan laut Natuna. Posisi dari Kapal pengawas perikanan ini sudah masuk dalam ZEE Indonesia yang termasuk dalam klaim sengketa antara Indonesia dengan Vietnam. Kejadian ini merupakan salah satu bentuk klaim bahwa wilayah sengketa masuk dalam daerah penangkapan Vietnam. Kegiatan dari kapal ini salah satunya mengawal dan mengusir kapal-kapal nelayan Indonesia maupun kapal patroli Indonesia jika



mengganggu kapal ikan dari negaranya. Bentuk perhatian ini akan mengundang konflik terbuka apabila aparat keamanan Indonesia apabila salah bertindak dalam mengusir kapal pengawas Vietnam tersebut.

Bentuk Penanganan Keamanan Maritim Di Wilayah Natuna.

Tindakan penanganan keamanan wilayah Perbatasan laut Natuna terlalu luas jika hanya dijaga oleh kapal patroli dari TNI AL. Untuk menjaga keseluruhan luas wilayah laut diperlukan kehadiran dari kapal-kapal patroli dari sipil, militer dan informasi dari kapal-kapal milik pengguna jasa kemaritiman. Lanal Ranai merupakan satuan tugas yang menunjukkan keberadaan TNI AL di pulau-pulau terdepan dan strategis, akan tetapi kendala keterbatasan gerak dari kapal patroli dan kemampuan kinerja dari kapal-kapal patroli milik Lanal dikarenakan wilayah luas.

Menangani kendala yang ada memang perlu adanya *sinergitas* terutama penggunaan alat utama oleh instansi lain yang kekurangan kapal tapi ada anggaran untuk menggerakkan kapal-kapal patroli milik instansi samping. Maksud dengan kendali operasi yakni mengalih kendali operasinya di bawah naungan instansi yang memiliki

program pengamanan laut tetapi kendalanya kurang kapal patroli pendukung. Anggaran yang dimiliki instansi tersebut yang akan membina dan mengambil alih bina kendali operasi akan mendanai baik logistik kapal, logistik perorangan maupun logistik lainnya yang berkaitan dengan operasi yang digelarnya.

Dampak dari penanganan keamanan memiliki keterkaitan terhadap aspek dasar pertahanan keamanan yang mana kedaulatan negara berupa garis perbatasan negara selalu mendapat ancaman dengan masuknya nelayan asing terutama negara tetangga yang berusaha mengambil kekayaan ekonomi laut dasar Indonesia, hal ini merupakan bentuk ancaman nyata bagi suatu negara yang menganut dasar negara kepulauan, secara kasat mata perbatasan.

Garis *imaginer* hanya bisa dilukis dalam peta, . maka dari itu perlu penanganan yang terkoordinasi antar para stakeholder pelaku penanganan keamanan maritim dan masyarakat pelaku kegiatan di laut. Aktifitas para pelaku jasa maritim di laut juga bisa digunakan sebagai mata-mata pengawasan kegiatan ilegal di laut. Dengan terintegrasi sistem informasi yang bisa dibangun antar lembaga pemerintah, non pemerintah baik yang bergerak dibidang kemaritiman maupun



sebagai jasa pengguna lalu lintas laut akan memudahkan penanganan kejahatan di laut.

Pengamanan Laut Oleh Aparat Keamanan Maritim

Pengamanan wilayah laut Natuna di mana luas lautnya 99,75 persen berupa lautan. Laut Natuna merupakan salah satu pendongkrak ekonomi bagi masyarakat Natuna. Perlu pengamanan laut terkait ancaman pencurian dan pengusiran oleh negara tetangga dalam hal ini Vietnam. Pelaksanaan pertahanan dan keamanan di daratan khususnya gugusan pulau Natuna bisa dikatakan *high level security*. Tetapi wilayah darat berbeda karakteristiknya dengan laut, yang tidak kelihatan garis batasnya/ *imaginer line*, karena laut Natuna merupakan salah satu wilayah penangkapan ikan terluas dan ikannya melimpah maka negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Vietnam kerap mengincar kekayaan alam hayati tersebut. Kapal Malaysia sudah banyak berkurang bahkan hampir nihil meski masih ada, tetapi bagi nelayan Vietnam mencari ikan segar di perbatasan laut Natuna merupakan pendongkrak ekonominya warga negaranya.

Sistem pertahanan untuk menjaga perbatasan wilayah Natuna dalam tesis yang

ditulis oleh (Nasution, 2012) hasil pengamatan indra terkait analisa terhadap peranan militer (*hard power*) dalam mempertahankan wilayah perbatasan khususnya di Natuna dan memperkuat pertahanan laut sebagai bukti kedaulatan suatu negara. Penelitian ini hampir sama dengan yang akan diteliti, akan tetapi ada perbedaan yang terlihat dari pendekatan yang dilakukan oleh Indra Junjungan Nasution lebih kepada pendekatan militer. Pendekatan militer lebih diproyeksikan pada sistem pertahanan bukan kepada keamanan perbatasan laut di era sekarang yang menuntut integrasi baik sipil maupun militer khususnya dalam perbantuan kekuatan.

Kapal perang TNI AL yang melakukan operasi perbatasan, unsur patroli dari sipil juga penting dalam hal ini menggalang *sinergitas* logistik bahan bakar dan kehadiran di laut perbatasan apabila tidak ada kapal perang yang sedang patroli di wilayah Natuna. Pentingnya pertukaran informasi dalam pengamanan wilayah laut bisa dilakukan dalam mengantisipasi kegiatan pencurian baik asing maupun kegiatan *illegal* oleh masyarakat setempat. Dukungan personil dari posal dan instansi sipil dengan memberikan arahan dan juga meminta informasi terkait perkembangan dari situasi



saat nelayan setelah melaut. Idealnya, para nelayan merupakan bagian dari unsur maritim yang bisa memberikan informasi *update* di laut.

Filling Gap Penjagaan Perbatasan Wilayah Laut

Kekosongan wilayah patroli memang akan menjadi dilema bagi para aparat penegak hukum apabila pergerakan operasi selalu bocor dan perlu koordinasi yang ketat antar instansi dalam mengisi wilayah patroli yang kosong tersebut sehingga tidak ada celah bagi oknum pelaku penangkapan *illegal fishing* berbuat curang.

Perlu adanya sinergitas di laut dalam menjaga laut dalam konteks keamanan maritim, (Purbasari, 2013) menulis tentang “*Sinergitas Fungsi Keamanan Maritim Indonesia Dalam Mengantisipasi Dinamika Ancaman Abad XXI*”, penekanan Endah pada pelaksanaan keamanan maritim bukan bertumpu pada kekuatan TNI AL semata, akan tetapi *sinergitas* instansi dalam hal ini sangat diperlukan. Presiden Joko Widodo, telah membentuk badan baru yang memiliki semua fungsi dalam penegakan hukum dan pelaksanaan keamanan maritim sebagai *coast guard*/ BAKAMLA yang di dalamnya terdapat 12 *stakeholder* dan bisa menyatukan tupoksinya dalam pelaksana

keamanan maritim Indonesia. Kesimpulan dari peneliti (a) tidak ada kebijakan dan startegi nasional yang komprehensif dan solid, (b) tumpang tindih perundang-undangan dan (c) bersifat sektoral. Akibatnya terjadi inefektivitas dan inefisiensi dalam menjaga keamanan maritim Indonesia.

Selain meningkatkan pengawasan terhadap perbatasan laut, perlu juga menginventaris mercu suar yang merupakan keselamatan bernavigasi memakai jasa kemaritiman. Singgah di pulau-pulau terdepan juga merupakan sistem pertahanan dan keamanan yang meminimalkan kegiatan-kegiatan *illegal* bagi penyelundup yang memanfaatkan pulau kosong sebagai basis distribusi barang haramnya. Meski sampai pewawancara mencari informasi kepada para pejabat di Natuna tentang peredaran narkoba, masih sangat minim sekali peluangnya untuk berkembang di masyarakat Natuna. Tetapi segala bentuk ancaman apapun tetap harus diwaspadai karena adanya kesempatan masuknya barang haram tetap ada. Perhatian dari aparat keamanan yang berpatroli di sekitar pulau terdepan seperti Pulau Serasan yang berbatasan langsung dengan Malaysia tetap dimaksimalkan agar masyarakat merasakan



pengamanan dari pemerintah Indonesia melalui patroli keamanan maritim TNI AL dan kapal sipil baik Pemkab Natuna maupun aparat sipil lainnya.

Pengaruh Penanganan Keamanan Maritim Terhadap Ketahanan Wilayah

Pengaruh penanganan keamanan maritim dilaksanakan pada tahap awal yakni pihak internal. Pembinaan yang dimaksud yaitu pembinaan pada masyarakat Natuna terlebih dahulu agar bisa menumbuhkan rasa kecintaan terhadap wilayahnya. Penanganan keamanan pada tahap selanjutnya yaitu pengamanan perbatasan laut, dilakukan tindakan pencegahan dari pihak luar di mana situasi yang sudah terkendali dari dalam maka ancaman muncul dari luar berarti perlu penanganan ke luar. Menangkal ancaman dari laut yang selama ini merupakan ancaman eksternal bagi ketahanan wilayah Natuna.

Penanganan tahap awal dengan memberikan bantuan kepada masyarakat nelayan Natuna merupakan bentuk pelayanan negara kepada masyarakatnya. Masyarakat mandiri memiliki kecenderungan ketahanan wilayah yang tangguh. Pelayanan yang sudah terlaksana meski belum rutin akan tetapi masyarakat sudah memiliki gambaran dan tambahan keterampilan yang

akan semakin sama akan semakin baik apabila program pendampingan yang berjalan dari pemerintah daerah maupun pusat berjalan intensif sesuai berjalannya waktu.

Penguatan dengan memberikan peningkatan keahlian bagi masyarakat sudah berjalan, akan tetapi faktor ancaman dari luar tetap merupakan gangguan dari faktor eksternal yang perlu mendapatkan tanggapan serius dari pemerintah melalui *stakeholder* berwenang. Wilayah penangkapan ikan atau WPPRI 711 selama ini selalu dimasuki oleh KIA (kapal ikan asing), keberadaan KIA ini sangat mengganggu pendapatan dan keberadaan kapal nelayan Indonesia terutama hasil tangkapan yang harus berebut dan diusir oleh kapal ikan asing, perlu perhatian dari pemerintah baik pusat maupun daerah dalam menyikapi urusan yang bersifat politis dan mengandung unsur kekuatan pendongkrak perekonomian baik lokal maupun nasional, penting peran serta aparat keamanan dalam “menjaga keamanan wilayah batas laut”. Visi kemaritiman Indonesia sudah mulai digerakkan, terbangun dari eksplorasi terhadap daratannya yang akan segera habis kalau terus menerus di eksplorasi. Tentunya, lautan menjadi primadona penangkapan ikan



untuk mendukung perekonomian masyarakat Natuna, lokasi batas laut yang berdekatan dengan dua negara tetangganya yakni Malaysia dan Vietnam menuai banyak masalah. Banyaknya masalah, tentu menjadi hal dalam pembahasan berkaitan dengan aspek panca gatra terutama aspek politik, aspek sosial budaya dan aspek ekonomi.

Aspek -aspek yang berpengaruh tersebut merupakan aspek yang terdampak dari penanganan keamanan maritim yang sudah berjalan. Banyak hal yang bisa membuat kerugian bagi masyarakat Natuna yang mendiami pulau di mana sebagian besar wilayahnya dikelilingi lautan dan sumber daya daratnya sangat terbatas untuk mendukung dan meningkatkan perekonomian penduduk setempat. Dukungan bagi penduduk perbatasan yang mendiami pulau agak jauh juga sarat dengan kebutuhan ekonomi yang stabil dan infrastruktur yang lebih baik dari sebelumnya, serta pengawasan dan pemanfaatan terhadap pulau-pulau kosong oleh pemerintah daerah agar terhindar dari penyalahgunaan pulau sebagai daerah transit hal *illegal* seperti narkoba.

Pemerintah Kabupaten Natuna juga sangat menginginkan efek dari laut yang aman bisa menambah penghasilan bagi

nelayan, terlaksananya *exit* dan *entry point*, migas, BMKT dan pulau-pulau kosong sebagai obyek pariwisata di mana harapannya nelayan bisa menambah penghasilan dengan menyewakan perahunya dalam mendukung program pariwisata pemerintah Kabupaten. Penanganan keamanan batas wilayah laut dampaknya sangat besar mengingat bahwa masyarakat kita masih butuh perhatian dari pemerintahannya, butuh pengembangan wilayah beserta infrastrukturnya.

Pengamanan batas laut Natuna merupakan bentuk pernyataan bahwa Indonesia ada dan tetap mengawalnya sampai daerah terpencil sekalipun. Wilayah batas laut Natuna tidak pernah berhenti berombak hingga saat ini, banyak potensi yang perlu dijaga dan diamankan. Kasus di bawah ini bisa sedikit menggugah pembaca “mengapa laut batas wilayah Natuna perlu dikawal dan dijaga”. Sepanjang tahun 2019 ini, Koordinator Nasional *Destructive Fishing Watch* (DFW) Indonesia menemukan 13 kapal patroli milik Vietnam, kapal-kapal tersebut terdiri dari kapal patroli perikanan dan kapal *coast guard* dan fokus melakukan penjagaan di wilayah perbatasan antar negara. Ini merupakan tindakan represif Vietnam dan mengulur waktu penyelesaian ZEE (Ambari, 2019). Permasalahan ini



mengandung unsur kesengajaan dari Vietnam, karena kebutuhan ikan buat negaranya untuk mendongkrak ekspor sangat besar.

SIMPULAN

Penanganan keamanan ke dalam yaitu mengatasi permasalahan yang bersifat internal yang ancamannya dilakukan oleh masyarakat, bersifat merusak dan menguntungkan sekelompok orang. Ancaman ini lebih condong kepada masalah internal negara, karena program yang sudah dibuat seperti tol laut, program pembinaan teknis penggunaan alat tangkap dan bantuan kapal terhadap nelayan belum bisa dilaksanakan tepat sasaran mengingat kondisi sosial budaya masyarakat Natuna yang rata-rata tidak memiliki pola berpikir maju dan penduduk masih berpendidikan rendah. Upaya kebijakan serta program kerja pemerintah baik daerah maupun pusat belum terasa sampai ke ujung perbatasan yang merupakan teras negara Indonesia. Penanganan keamanan maritim yang ancamannya dari luar merupakan potensi besar kerugian bagi wilayah Natuna dan negara. Ancaman dari luar seperti pencurian ikan oleh nelayan asing, pemanfaatan jarak

antar pulau untuk melakukan penyelundupan narkoba, perdagangan manusia serta penyelundupan barang dagang ilegal. Ancaman ini pemicunya lebih kepada aspek politik negara karena menyangkut dua negara yang belum tuntas dalam penyelesaian batas wilayah ZEE.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiastuti, I. K. dan Anugerah. 2018. Intervensi Tiongkok Dalam Penegakan Hukum Illegal Fishing Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Kasus Kapal Kway Fey 10078, Tiongkok). *Jurnal Hukum IV*: 1–10.
- Agistia, I. G., & Perwita, A. A. 2016. *Maritime Security in the Indo-Pasific*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- BPS Kabupaten Natuna. 2018. *Kabupaten Natuna Dalam Angka Natuna Regencyin Figures 2018*. Kota Ranai.
- Buzan, B. 1991. *People, States, and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era*. Harrow: Longman.
- Ikhtiari, R. W. 2011. *Strategi Keamanan Maritim Indonesia Dalam Menanggulangi Ancaman Non-Traditional Security, Studi Kasus:*



- Illegal Fishing Periode Tahun Nasional Gadjah Mada, Yogyakarta.
2005-2010.
- KKP. 2015. Mina Bahari. *Pusat Data, Statistik, Dan Informasi Kementerian Kelautan Dan Perikanan*, 82.
- Nasution, I. J. 2012. Strategi Pertahanan Wilayah (Studi di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau). Tesis: Program Studi Ketahanan Nasional Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Prabowo, E. E. 2013. Kebijakan Dan Strategi Pertahanan Indonesia (Studi Kasus Konflik Di Laut Cina Selatan). 3, 117–129.
- Purbasari, E. D. 2013. Sinergitas Fungsi Keamanan Maritim Indonesia Dalam Mengantisipasi Dinamika Ancaman Abad XXI. *Keamanan Maritim*, 1–8.
- Ramli, R. P. 2017. Sengketa Republik Indonesia – Republik Rakyat Tiongkok Di Perairan Natuna. *Hubungan Internasional* 1, no. 1.
- Sugiyono. 2013. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugito, A. 2008. Pengamanan Sumber Energi Natuna D Alpha Dalam Kerangka Menjaga Keamanan Energi (Studi di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepri). Tesis: Program Studi Ketahanan